

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian yang telah di jelaskan penulis pada bab sebelumnya, hasil yang didapatkan bisa disimpulkan, yaitu:

1. Peran Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam menanggulangi kasus penipuan Identitas Diri (Cahfishing) di Kalimantan Selatan:

Peran Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam menanggulangi kasus penipuan Identitas Diri (Cahfishing) di Kalimantan Selatan masih belum efektif sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang tertera di dalam Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 dikarenakan masih ada faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi kasus penipuan Identitas Diri (Cahfishing) di Kalimantan Selatan dari segi faktor penegakan hukum, faktor hukum sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang belum terpenuhi.

#### **B. Saran**

1. Bagi kepolisian, penting untuk terus meningkatkan kapasitas penyidik dalam bidang kejahatan siber dengan memperbarui keterampilan terkait analisis forensik digital serta memperluas kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet guna mempercepat proses identifikasi dan penindakan pelaku *Catfishing*. Selain itu, penguatan kampanye edukasi publik secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko *Catfishing* dan pentingnya perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas.
2. Bagi pemerintah perlu mempertimbangkan revisi dan harmonisasi beberapa undang-undang yang relevan dan dapat mengembangkan pedoman khusus untuk platform digital dalam mencegah dan menangani tindakan penipuan identitas guna memastikan tanggung jawab platform dalam melindungi pengguna. Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut, kerangka hukum akan menjadi lebih jelas, koheren, dan efektif dalam menangani kejahatan *Catfishing* di Indonesia.
3. Saran Penelitian berikutnya tentang kasus *Catfishing* di aplikasi daring dapat difokuskan pada analisis peran platform digital dalam pencegahan dan penanganan

penipuan identitas. Peneliti disarankan untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum penyedia aplikasi berdasarkan kebijakan privasi dan persyaratan layanan mereka, serta bagaimana regulasi perlindungan data pribadi diterapkan secara praktis. Selain itu, kajian komparatif tentang regulasi dan pendekatan penegakan hukum di negara lain dapat memberikan perspektif baru untuk memperbaiki kebijakan nasional. Penelitian berbasis pengalaman pengguna juga penting untuk memahami tantangan yang dihadapi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif.

